

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI
PENGOLAHAN HASIL HUTAN
Tim Produksi Hasil Hutan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kegiatan industri pengolahan hasil hutan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang memadai, baik dari sisi jumlah, mutu, maupun ketepatan waktu pasokan. Ketersediaan bahan baku yang stabil berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi dan efisiensi operasional industri. Sebaliknya, gangguan pasokan dapat menurunkan kapasitas produksi sekaligus mengganggu kelangsungan usaha.

Untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan bahan baku dengan realisasi di lapangan, serta memastikan bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang legal dan telah terverifikasi sesuai ketentuan kehutanan, perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap pelaku usaha industri pengolahan hasil hutan. Laporan ini merupakan konsolidasi hasil monev yang telah dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) unit usaha industri pengolahan hasil hutan di wilayah kerja pada periode Mei 2026, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) tersendiri.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
4. Surat Perintah Tugas (SPT) pelaksanaan monitoring dan evaluasi masing-masing unit usaha, sebagaimana dirinci pada Lampiran Administrasi Pelaksanaan Tugas.

3. Tujuan

1. Memantau realisasi pemenuhan bahan baku industri pengolahan hasil hutan sesuai kapasitas produksi yang diizinkan.
2. Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi industri dalam memenuhi kebutuhan bahan baku.
3. Mengevaluasi kesesuaian sumber bahan baku dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk legalitas asal-usulnya.
4. Menyusun rekomendasi dan tindak lanjut untuk optimalisasi pemenuhan bahan baku industri di wilayah kerja.

4. Sasaran/Lingkup Kegiatan

Kegiatan monev pada periode ini dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) unit usaha industri pengolahan hasil hutan kayu, yaitu: UD. Anugrah Jaya Abadi, Jati Sinar Gemilang, Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML), CV. Kayu Manis, UD. Kurnia Jati Furniture, PT. Marga Agung, UD. Mekar Jati, UD. Royyan Jati, dan CV. Yolla Sono Gemilang.

5. Metode Pelaksanaan

- Koordinasi awal dengan pemilik atau pengelola industri untuk menentukan jadwal kunjungan dan menyiapkan data awal kapasitas produksi serta sumber pasokan bahan baku.
- Pengumpulan data lapangan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen legalitas bahan baku, dan peninjauan langsung ke lokasi industri.
- Identifikasi kendala yang dihadapi industri dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, baik dari sisi ketersediaan, transportasi, maupun administrasi.

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi per Unit Usaha

1. UD. Anugrah Jaya Abadi (Kabupaten Bantul)

Pasokan bahan baku industri selama ini rutin berasal dari wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo. Total realisasi bahan baku yang telah terpenuhi tercatat mencapai 492,11 m³. Ketersediaan bahan baku masih dinilai cukup untuk menunjang operasional, dan dokumen administrasi maupun legalitas asal bahan baku tersedia dan dapat ditunjukkan saat kegiatan berlangsung. Secara keseluruhan, pemenuhan bahan baku berjalan cukup lancar.

2. Jati Sinar Gemilang (Wonosari, Kabupaten Gunungkidul)

Perusahaan memiliki kapasitas produksi 1.800 m³/tahun dan masih aktif beroperasi. Bahan baku berasal dari BKPH Yogyakarta, KTHKm Sedyo Makmur, KTHKm Tani Manunggal, hutan rakyat di Bantul dan Gunungkidul, serta Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku hingga saat monev mencapai 127,43 m³, seluruhnya berasal dari BKPH Yogyakarta. Administrasi dan legalitas bahan baku telah sesuai ketentuan, namun kontinuitas pasokan tetap perlu dijaga.

3. Koperasi Wana Manunggal Lestari/KWML (Dengk, Playen, Kabupaten Gunungkidul)

Koperasi memiliki kapasitas produksi 700 m³/tahun. Rencana pemenuhan bahan baku berasal dari KTHKm Sedyo Makmur dan hutan rakyat Kabupaten Gunungkidul dengan total rencana 1.388,39 m³. Realisasi hingga saat monev mencapai 127,47 m³, seluruhnya dari hutan rakyat Gunungkidul. Administrasi dan legalitas bahan baku tersedia sesuai ketentuan.

4. CV. Kayu Manis (Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul)

Perusahaan berkapasitas produksi 6.000 m³/tahun, dengan kebutuhan bahan baku sebagian besar berasal dari kayu rakyat wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Rencana pemenuhan bahan baku tercatat 3.779,07 m³, sedangkan realisasi mencapai 1.126,29 m³, berasal dari Kabupaten Bombana, Bau-Bau, dan Konawe (Sulawesi Tenggara) serta Palopo dan Wajo (Sulawesi Selatan). Realisasi penggunaan bahan baku sampai dengan bulan April untuk proses produksi tercatat 480,63 m³ dan penggunaan lain 226,35 m³, dengan hasil olahan kayu gergajian sebesar 277,46 m³. Perusahaan telah rutin menyampaikan laporan realisasi bulanan sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara tertib.

5. UD. Kurnia Jati Furniture (Kabupaten Gunungkidul)

Bahan baku yang digunakan terdiri dari kayu Sengon, Jati, Acacia, dan Mahoni. Kayu Sengon merupakan bahan baku dengan volume penggunaan terbesar, mencapai sekitar 100 m³ per bulan, dengan hasil produksi dikirim ke Temanggung, Semarang, dan Wonosobo. Penggunaan kayu Jati tercatat sekitar 15 m³ per bulan, sementara Acacia dan Mahoni masing-masing sekitar 10-15 m³ per bulan. Ketersediaan bahan baku masih mampu mendukung

operasional, namun penyusunan laporan bulanan masih mengalami kendala karena tenaga admin perusahaan menangani beberapa pekerjaan lain sekaligus.

6. PT. Marga Agung (Sendangdadi, Mlati, Kabupaten Sleman)

Perusahaan berkapasitas produksi 1.800 m³/tahun. Rencana pemenuhan bahan baku berasal dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur, serta TPT-KB CV. Anugerah Rejeki Bersama (Jawa Timur). Realisasi pemenuhan bahan baku hingga saat monev mencapai 962,96 m³, dengan rincian sebagian volume tercatat berasal dari Perhutani Unit I (37,50 m³), Perum Perhutani Unit II (13,07 m³), dan CV. Anugerah Rejeki Bersama (20,90 m³). Administrasi dan legalitas bahan baku dapat ditunjukkan saat kegiatan monitoring berlangsung.

7. UD. Mekar Jati

Bahan baku yang digunakan berasal dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan kegiatan pengolahan kayu masih berjalan. Namun, hingga saat monev, proses pengolahan belum tercatat dalam sistem SIPUHH sehingga realisasi bahan baku pada laporan masih tercatat nihil. Kondisi ini disebabkan tenaga teknis kehutanan (Ganis) perusahaan masih disibukkan dengan pekerjaan lain. Perusahaan menyampaikan akan meminta bantuan Ganis dari UD. Cahaya Baru untuk menyelesaikan pencatatan dan pelaporan.

8. UD. Royyan Jati

Kebutuhan bahan baku dipenuhi dari beberapa daerah pemasok, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Karanganyar, Wonogiri, dan Ngawi, dengan total rencana pemenuhan bahan baku 1.515,80 m³. Ketersediaan bahan baku secara umum masih cukup untuk menunjang operasional. Namun, hingga saat monev, perusahaan belum menyampaikan laporan realisasi bulanan sejak Maret 2026, sehingga data realisasi belum dapat dipantau secara maksimal. Perusahaan menyampaikan komitmen untuk segera melengkapi laporan yang tertunggak.

9. CV. Yolla Sono Gemilang

Bahan baku berasal dari BKPH Yogyakarta melalui mekanisme lelang, serta hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Jenis kayu yang digunakan meliputi Sonokeling, Jati, Munggur, dan Sonokembang. Dokumen administrasi bahan baku telah dilengkapi sesuai ketentuan, dan ketersediaan bahan baku dinilai cukup untuk menunjang produksi. Kontinuitas pasokan tetap perlu dijaga mengingat kebutuhan produksi dapat berubah mengikuti permintaan pasar.

C. Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi

Rekapitulasi berikut menyajikan ringkasan sumber bahan baku, rencana dan realisasi volume, serta status/catatan hasil movev pada masing-masing unit usaha.

No	Nama Unit Usaha	Lokasi	Sumber Bahan Baku	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)	Status/Catatan
1	UD. Anugrah Jaya Abadi	Kab. Bantul	Gunungkidul, Kulon Progo	3.333,33	492,11	Lancar; administrasi & legalitas lengkap
2	Jati Sinar Gemilang	Wonosari, Gunungkidul	BKPH Yogyakarta; KTHKm Sedyo Makmur; KTHKm Tani Manunggal; hutan rakyat Bantul/Gunungkidul; Perum Perhutani Unit I Jateng	1.800	127,43 (dari BKPH Yogyakarta)	Lancar; admin lengkap; perlu jaga kontinuitas pasokan
3	Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML)	Dengok, Playen, Gunungkidul	KTHKm Sedyo Makmur; hutan rakyat Gunungkidul	1.388,39	127,47 (dari hutan rakyat)	Lancar; admin lengkap
4	CV. Kayu Manis	Tamanan, Banguntapan, Bantul	Kayu rakyat Sulawesi Tenggara (Bombana, Bau-Bau, Konawe) & Sulawesi Selatan (Palopo, Wajo)	3.779,07	1.126,29	Lancar; laporan bulanan rutin disampaikan
5	UD. Kurnia Jati Furniture	Kab. Gunungkidul	Kayu Sengon, Jati, Acacia, Mahoni (multi sumber lokal/regional)	-	Sengon ±100/bln; Jati ±15/bln; Acacia & Mahoni ±10-15/bln	Kendala: laporan bulanan terlambat (beban admin rangkap tugas)
6	PT. Marga Agung	Sendangdadi, Mlati, Sleman	Perum Perhutani Unit I Jateng & Unit II Jatim; TPT-KB CV. Anugrah Rejeki Bersama	1.391,49	962,96 (rincian: 37,50 Unit I; 13,07 Unit II; 20,90 CV. Anugrah Rejeki Bersama)	Lancar; admin lengkap

No	Nama Unit Usaha	Lokasi	Sumber Bahan Baku	Rencana (m³)	Realisasi (m³)	Status/Catatan
7	UD. Mekar Jati	-	Perum Perhutani Unit I Jateng	500	Nihil (belum diinput SIPUHH)	Kendala: Ganis belum optimal melakukan pencatatan/pelaporan
8	UD. Royyan Jati	-	Gunungkidul, Karanganyar, Wonogiri, Ngawi	1.515,80	Belum dilaporkan sejak Maret 2026	Kendala: laporan bulanan tertunggak
9	CV. Yolla Sono Gemilang	-	BKPH Yogyakarta (lelang); hutan rakyat Gunungkidul & Wonogiri	2.500	Cukup, tanpa angka pasti dilaporkan	Lancar; admin lengkap; jenis kayu: Sonokeling, Jati, Munggur, Sonokembang

D. Temuan dan Analisis

Berdasarkan hasil monev terhadap 9 (sembilan) unit usaha, secara umum pemenuhan bahan baku industri pengolahan hasil hutan kayu di wilayah kerja masih berjalan dengan cukup baik. Sumber bahan baku yang digunakan beragam, mulai dari hutan negara yang dikelola Perum Perhutani dan BKPH Yogyakarta, kelompok tani hutan kemasyarakatan (KTHKm), hutan rakyat di DIY dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah, hingga kayu rakyat dari luar Jawa (Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan).

Dari sisi kepatuhan administratif dan pelaporan, teridentifikasi pengelompokan sebagai berikut:

- Unit usaha dengan kondisi baik (administrasi dan legalitas lengkap, pelaporan berjalan tertib): UD. Anugrah Jaya Abadi, Jati Sinar Gemilang, Koperasi Wana Manunggal Lestari, CV. Kayu Manis, PT. Marga Agung, dan CV. Yolla Sono Gemilang (6 unit usaha).
- Unit usaha dengan kendala administratif/pelaporan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut: UD. Kurnia Jati Furniture (laporan bulanan terlambat akibat beban kerja admin rangkap tugas), UD. Mekar Jati (realisasi tercatat nihil karena belum diinput dalam SIPUHH, disebabkan tenaga teknis/Ganis belum optimal menjalankan tugas), dan UD. Royyan Jati (belum menyampaikan laporan realisasi bulanan sejak Maret 2026) (3 unit usaha).

Temuan ini menunjukkan bahwa kendala yang muncul pada sebagian unit usaha tidak terletak pada ketersediaan bahan baku di lapangan, melainkan pada ketertiban administrasi dan pelaporan, khususnya terkait kapasitas tenaga teknis (Ganis) dan tenaga administrasi yang merangkap pekerjaan lain. Hal ini berimplikasi pada keandalan data realisasi yang dapat dipantau melalui SIPUHH maupun laporan bulanan manual.

E. Kesimpulan

1. Secara umum, pemenuhan bahan baku pada 9 (sembilan) unit usaha industri pengolahan hasil hutan yang dimonev masih berjalan dengan baik dan didukung oleh sumber bahan baku yang jelas, baik dari hutan negara, perhutanan sosial, hutan rakyat, maupun pasokan antarwilayah/antarprovinsi.
2. Realisasi pemenuhan bahan baku yang tercatat bervariasi antarunit usaha, mulai dari yang telah mencapai ratusan hingga lebih dari seribu meter kubik (misalnya CV. Kayu Manis dan PT. Marga Agung), hingga unit usaha yang realisasinya belum tercatat optimal akibat kendala administrasi (UD. Mekar Jati dan UD. Royyan Jati).

3. Sebagian besar unit usaha (6 dari 9) telah memenuhi ketertiban administrasi dan legalitas bahan baku sesuai ketentuan yang berlaku, sementara 3 unit usaha masih memerlukan pembinaan lebih lanjut terkait ketertiban pelaporan dan/atau optimalisasi peran tenaga teknis (Ganis).
4. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha lebih banyak bersifat administratif (keterlambatan/ketidaklengkapan pelaporan) dibandingkan permasalahan ketersediaan fisik bahan baku di lapangan.

F. Saran dan Rekomendasi

1. Bagi unit usaha dengan kendala pelaporan (UD. Kurnia Jati Furniture, UD. Mekar Jati, dan UD. Royyan Jati), agar segera melakukan pembenahan administrasi, termasuk penyelesaian tunggakan laporan realisasi bulanan dan input data ke dalam SIPUHH, serta memastikan ketersediaan tenaga teknis (Ganis) yang fokus menjalankan tugas pencatatan dan pelaporan.
2. Instansi pembina agar memberikan pendampingan teknis kepada unit usaha yang mengalami kendala administratif, termasuk fasilitasi penguatan kapasitas tenaga Ganis dan tenaga administrasi.
3. Seluruh unit usaha agar tetap menjaga kontinuitas kerja sama dengan pemasok bahan baku guna memastikan kelangsungan pasokan, mengingat kebutuhan produksi dapat berubah mengikuti permintaan pasar.
4. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap seluruh unit usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penatausahaan hasil hutan dan legalitas bahan baku.
5. Diperlukan koordinasi lebih intensif antara instansi pembina, unit usaha, dan pemasok bahan baku (termasuk KTHKm, hutan rakyat, dan Perum Perhutani) untuk memperkuat sistem pasokan bahan baku secara jangka panjang.

G. Penutup

Laporan monitoring dan evaluasi realisasi pemenuhan bahan baku industri ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan terhadap 9 (sembilan) unit usaha industri pengolahan hasil hutan, sekaligus sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pihak terkait. Diharapkan hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung pembinaan, pengawasan, dan perbaikan tata kelola pemenuhan bahan baku industri pengolahan hasil hutan secara berkelanjutan.

Lampiran:

1. Administrasi Pelaksanaan Tugas

Tabel berikut menyajikan nomor Surat Perintah Tugas (SPT), tanggal pelaksanaan, dan petugas pelaksana movev pada masing-masing unit usaha.

No	Unit Usaha	No. SPT	Tanggal Pelaksanaan	Petugas Pelaksana
1	UD. Anugrah Jaya Abadi	B/800.1.11.1/1230/D5	6 Mei 2026	Ali Machfudi, S.Pi., M.Sc
2	Jati Sinar Gemilang	B/800.1.11.1/1211/D5	5 Mei 2026	Wahyu Navitri H., S.Hut
3	Koperasi Wana Manunggal Lestari	B/800.1.11.1/1262/D5	6 Mei 2026	Joko Riyanto
4	CV. Kayu Manis	B/800.1.11.1/1320/D5	11 Mei 2026	Oky K., S.Hut., M.Acc
5	UD. Kurnia Jati Furniture	B/800.1.11.1/1323/D5	11 Mei 2026	Joko Riyanto
6	PT. Marga Agung	B/800.1.11.1/1276/D5	7 Mei 2026	Oky K., S.Hut., M.Acc
7	UD. Mekar Jati	B/800.1.11.1/1258/D5	6 Mei 2026	Ali Machfudi, S.Pi., M.Sc
8	UD. Royyan Jati	B/800.1.11.1/1281/D5	7 Mei 2026	Ali Machfudi, S.Pi., M.Sc
9	CV. Yolla Sono Gemilang	B/800.1.11.1/1231/D5	6 Mei 2026	Wahyu Navitri H., S.Hut

2. Dokumentasi Pelaksanaan Tugas



